PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA BERKELANJUTAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
(Studi terhadap Peningkatan Status Desa Berdasarkan Indeks Desa)

Ryanti Oktavia Barus
NPP. 33.0108
Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
Email: ryantioktaviabarus@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dwi Indah Kartika, S.Pd., M.Si.
Email: dwi_indah@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *Village status improvement in Serdang Bedagai Regency has been uneven and has not fully reflected substantive village economic independence. This problem is characterized by inter-village capacity disparities, limited infrastructure, inadequate digital connectivity, and low human resource quality among village officials. While sustainable development is mandated by Law No. 3 of 2024 and President Prabowo Subianto's Asta Cita (specifically the sixth point focusing on building from villages), many village apparatuses still fail to utilize the Village Index data as a core baseline for planning.* ***Purpose:*** *This study examines the role of the Community and Village Empowerment Office (DPMD) of Serdang Bedagai Regency in sustainable village development based on the Village Index, identifies supporting and inhibiting factors, and analyzes efforts to address them.* ***Method:*** *A descriptive qualitative method was applied through in-depth interviews, non-participatory observation, and documentation. The study is guided by Soekanto's role theory, which encompasses three specific dimensions: active, participatory, and passive roles.* ***Result:*** *The findings reveal that DPMD optimally fulfilled its role through Village Index-based policy initiatives, management of village funds exceeding IDR 218 billion with absorption above 95 percent, facilitation of inclusive village deliberations, and comprehensive guidance and supervision. Independent villages significantly increased from 10 in 2023 to 74 in 2025, while developing villages declined from 180 to 48. Serdang Bedagai recorded a Village Index score of 0.7401 with Advanced Village status, ranking second highest in North Sumatra Province, supported by 133 active BUMDes units and road infrastructure improving from 44.79 to 56 percent in good condition. Key challenges include limited capacity of village officials, inadequate infrastructure, digital connectivity issues in remote areas, and inter-village disparities. Mitigating efforts encompass multi-level technical guidance, cross-agency coordination, implementation of Regent's Regulation No. 66 of 2025 aligned with Village SDGs, and program institutionalization into village development plans with a Village Index-based monitoring system.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the role of DPMD in supporting sustainable village development in Serdang Bedagai Regency has been optimally executed based on the expansion of village status achievement. It is recommended that DPMD shift intensive supervision toward systematic independence, utilize the Village Index as an early warning system, and integrate the Village Information System (SID) with Siskeudes and Village Index reporting platforms.*

Keywords: Role of DPMD; Sustainable Village Development; Village Index; Village SDGs

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Peningkatan status desa di Kabupaten Serdang Bedagai belum merata dan belum mencerminkan kemandirian ekonomi desa secara substantif, ditandai oleh ketimpangan kapasitas antardesa, keterbatasan infrastruktur dan konektivitas digital, serta rendahnya kualitas SDM aparatur desa. Sementara itu, komitmen pembangunan nasional melalui Asta Cita ke-6 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan UU No. 3 Tahun 2024 mewajibkan pembangunan dari bawah , namun di lapangan masih banyak aparatur desa yang belum memahami penggunaan data Indeks Desa sebagai basis perencanaan pembangunan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serdang Bedagai dalam mendukung pembangunan desa berkelanjutan berdasarkan Indeks Desa. **Metode:** Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi, dengan teori peran Soekanto yang mencakup tiga dimensi: peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan DPMD telah menjalankan perannya secara optimal melalui kebijakan berbasis Indeks Desa, pengelolaan Dana Desa lebih dari Rp218 miliar dengan penyerapan di atas 95%, fasilitasi musyawarah desa yang inklusif, serta pembinaan komprehensif. Keberhasilan ini tercermin dari peningkatan desa mandiri dari 10 menjadi 74 desa dalam periode 2023-2025, disertai penurunan desa berkembang dari 180 menjadi 48 desa. Kabupaten Serdang Bedagai meraih rata-rata nilai Indeks Desa 0,7401 dengan status Desa Maju (peringkat kedua tertinggi di Sumatera Utara), didukung 133 BUMDes aktif dan perbaikan jalan kondisi baik dari 44,79% menjadi 56%. Hambatan utama meliputi keterbatasan SDM aparatur desa, infrastruktur fisik, dan konektivitas digital di desa terpencil. **Kesimpulan:** Peran DPMD Kabupaten Serdang Bedagai dalam pembangunan desa berkelanjutan berbasis Indeks Desa telah terlaksana dengan sangat optimal. Disarankan agar DPMD mengalihkan pola pembinaan intensif menuju kemandirian sistematis, mengoptimalkan Indeks Desa sebagai *early warning system*, serta mengintegrasikan SID, Siskeudes, dan pelaporan Indeks Desa.

Kata kunci: Indeks Desa; Pembangunan Desa Berkelanjutan; Peran DPMD; SDGs Desa

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa diposisikan sebagai entitas hukum terdepan dan ujung tombak pelaksanaan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedudukan desa kini bukan lagi sekadar sebagai objek pembangunan, melainkan subjek hukum yang memegang otoritas penuh untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat (Palash et al., 2024). Agenda pembangunan nasional terkini di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (2024-2029) secara tegas memperkuat posisi ini melalui delapan agenda pokok yang dikenal sebagai Asta Cita. Secara eksplisit, agenda keenam Asta Cita menetapkan komitmen untuk "membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan" (Khadka & Schuett, 2024). Amanat ini diperkuat secara legal melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menuntut percepatan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat perdesaan. Transformasi regulasi ini menuntut adanya pergeseran paradigma birokrasi, dari yang semula bersifat mengontrol kini harus beralih fungsi menjadi memfasilitasi dan memberdayakan (Afnan et al., 2025).

Dalam konteks regional Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai menaruh perhatian besar pada akselerasi status kemandirian desa melalui pemanfaatan Indeks Desa. Indeks Desa difungsikan tidak sekadar sebagai alat ukur statistik kuantitatif semata, melainkan menjadi cerminan multidimensi atas ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi di tingkat akar rumput (Lin & Ye, 2025). Sebagai instrumen kebijakan, data Indeks Desa ditujukan untuk memetakan kemajuan pelayanan dasar, aksesibilitas, infrastruktur, serta efektivitas tata kelola pemerintahan desa. Melalui peran regulasi dan koordinasi yang dimotori oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serdang Bedagai, data Indeks Desa diupayakan menjadi acuan utama intervensi anggaran dan formulasi kebijakan pembangunan desa berkelanjutan secara komprehensif. Penguatan kelembagaan DPMD dalam mengawal instrumen ini menjadi kunci penting agar target kemandirian lokal dapat dicapai secara proporsional dan terukur.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Meskipun berbagai instrumen hukum, target SDGs Desa, dan regulasi penganggaran telah ditetapkan secara ideal, terdapat kesenjangan sosiologis dan manajerial yang nyata dalam implementasinya di Kabupaten Serdang Bedagai. Realitas empiris di lapangan menunjukkan bahwa peningkatan status desa belum merata sepenuhnya dan belum mampu merefleksikan nilai kemandirian ekonomi perdesaan secara substantif (Gokce & Yildiz, 2025). Peneliti secara rigid mengidentifikasi adanya polarisasi berupa ketimpangan kapasitas yang lebar antarwilayah perdesaan, di mana desa-desa yang berada dekat dengan pusat pemerintahan kabupaten berkembang jauh lebih cepat, sementara desa-desa di wilayah pinggiran atau yang terisolasi secara geografis mengalami stagnasi (Gatiningsih, 2022). Ketimpangan sosiologis ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur mendasar serta minimnya konektivitas digital di wilayah-wilayah terpencil tersebut.

Secara manajerial, kesenjangan nyata terlihat pada bagaimana aparatur desa mengelola perencanaan pembangunan mereka. Banyak aparatur desa di Kabupaten Serdang Bedagai yang belum memahami secara utuh bagaimana mengekstraksi dan menggunakan data Indeks Desa sebagai basis formulasi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Akibatnya, terjadi ketidaksinkronan (mismatch) manajerial di mana alokasi anggaran Dana Desa seringkali tidak sejalan dengan kelemahan dimensi yang ditunjukkan oleh indikator Indeks Desa. Sebagai contoh kasus di lapangan, sebuah desa yang memiliki skor ketahanan sosial rendah dalam aspek layanan kesehatan dasar justru lebih banyak menyerap anggaran Dana Desanya untuk pembangunan fisik kantor desa yang kurang mendesak (A. Simangunsong, 2023).

Di sisi lain, kelemahan manajerial ini juga diperparah oleh pola pembinaan konvensional dari instansi pembina yang cenderung bersifat generalis dan kurang adaptif dalam membedakan perlakuan pembinaan (*treatment*) bagi desa-desa yang mengalami kendala geografis. Kombinasi antara keterbatasan literasi data aparat desa, bias perencanaan pembangunan, dan kendala konektivitas digital inilah yang memicu terjadinya polarisasi pembangunan, sehingga menyulitkan desa-desa berstatus berkembang untuk mengejar ketertinggalan dan mencapai kemandirian secara substantif.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini memegang urgensi keilmuan dan praktis yang sangat krusial di tengah transisi kebijakan pembangunan desa nasional berbasis SDGs Desa. Secara teoritis-akademis, penelitian ini mendesak dilakukan guna mengonseptualisasikan pola peran kelembagaan sektor publik (khususnya tingkat dinas kabupaten) dalam mengawal transformasi status kemandirian desa menggunakan indikator pembangunan makro. Penelitian ini juga memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya

kajian ilmu pemerintahan perdesaan, khususnya mengenai dinamika akuntabilitas publik dan efisiensi birokrasi dalam penerapan kebijakan berbasis data. Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran empiris dan evaluatif yang objektif bagi DPMD Kabupaten Serdang Bedagai serta pengambil kebijakan lokal mengenai efektivitas intervensi program penguatan desa yang telah berjalan (Macora et al., 2024).

Jika penelitian ini tidak dilaksanakan, maka pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait akan mengalami kelangkaan basis data empiris yang objektif mengenai potret riil kendala aparatur desa. Dampak buruknya adalah perumusan kebijakan pembinaan dan asistensi penganggaran desa di masa mendatang berisiko berjalan tidak tepat sasaran (*misaligned*), kurang efektif, dan bersifat repetitif tanpa menyelesaikan akar masalah di tingkat bawah. Akibat lebih lanjut, pengentasan desa berkembang akan berjalan stagnan, penyerapan (Kansil & Hein Pusung, 2021) Dana Desa yang masif tidak akan linier dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan ketimpangan kemandirian antardesa di Kabupaten Serdang Bedagai akan semakin melebar. Ketiadaan evaluasi yang mendalam juga berpotensi membiarkan pemborosan anggaran negara terus terjadi tanpa memberikan kontribusi nyata bagi pengentasan kemiskinan dan pemenuhan layanan dasar di wilayah perdesaan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dipetakan dan dikontekstualisasikan melalui penelusuran terhadap beberapa studi terdahulu yang relevan dalam koridor pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan, serta pemanfaatan instrumen Indeks Desa. Studi terdahulu oleh Agus Nyoman Astika dan Nyoman Sri (Astika & Sri Subawa, 2021) mengenai evaluasi pembangunan desa berbasis Indeks Desa Membangun (IDM) menemukan adanya ketidaksesuaian tahapan pembangunan akibat fokus anggaran yang timpang pada infrastruktur fisik dan pengabaian sektor pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, (Ketut Winaya & Dewa Ayu Putri Wirantari, 2024) mengkaji tata kelola inovatif dalam program Desa Mandiri di Desa Bongkasa Pertiwi, dengan hasil yang menekankan pentingnya peningkatan partisipasi masyarakat serta penyediaan pelatihan yang terarah bagi aparatur lokal. Dari aspek metodologis kuantitatif, (Fajar et al., 2022) mengeksplorasi variabel pembangunan berkelanjutan dengan menyarankan pemutakhiran indikator IDM agar lebih konsisten dan selaras dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Sejalan dengan dimensi penganggaran, (Fakrusyi Sahkirin Hibatur Rokhman et al., 2025) melalui analisis regresi data panel membuktikan bahwa aspek penyerapan dan kecepatan penyaluran Dana Desa memegang pengaruh signifikan terhadap peningkatan IDM dengan jeda waktu tertentu. Terakhir, (Rohiani, 2021) menggarisbawahi pentingnya perencanaan tata ruang berbasis potensi desa serta efektivitas bimbingan teknis dalam meningkatkan pemahaman kepala desa demi mewujudkan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.

Secara umum, rangkaian studi terdahulu tersebut memberikan landasan teoretis yang kuat bahwa instrumen Indeks Desa merupakan alat ukur yang valid dalam memetakan kemajuan wilayah. Namun, terdapat benang merah yang menunjukkan bahwa peningkatan status desa tidak hanya bergantung pada ketersediaan atau besaran anggaran semata, melainkan sangat dipengaruhi oleh tata kelola pemerintahan yang baik, kualitas sumber daya manusia (SDM) aparat desa, dan ketepatan strategi pemberdayaan. Sebagian besar literatur terdahulu juga masih terbatas pada evaluasi di tingkat desa tunggal atau berfokus pada analisis statistik keuangan desa. Di sinilah letak celah (*gap*) akademis yang diisi oleh penelitian ini, yaitu dengan menempatkan fokus pengamatan pada tingkat kabupaten guna menelaah bagaimana peran kelembagaan birokrasi formal dalam menilai efektivitas serta mengawal implementasi kebijakan pembangunan secara makro.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki perbedaan yang jelas dengan penelitian-penelitian terdahulu baik dari aspek teoritis, metodologis, kebijakan yang dianalisis, maupun karakteristik objek penelitian (Ernawati, 2021).

Pertama, perbedaan dengan penelitian Astika dan Sri Subawa (2021). Penelitian Astika dan Sri Subawa berfokus pada evaluasi pembangunan desa berbasis Indeks Desa Membangun (IDM) dengan menitikberatkan pada kesesuaian alokasi anggaran pembangunan desa terhadap indikator IDM. Objek penelitian berada pada tingkat desa dan menghasilkan temuan mengenai dominasi pembangunan fisik dibandingkan pemberdayaan masyarakat. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak mengkaji efektivitas penggunaan anggaran desa, melainkan menelaah bagaimana peran kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serdang Bedagai dalam meningkatkan status desa berdasarkan Indeks Desa. Dari sisi teori, penelitian Astika dan Sri Subawa menggunakan pendekatan evaluatif terhadap capaian indikator pembangunan, sedangkan penelitian ini menggunakan Teori Peran Soekanto yang dimodifikasi ke dalam dimensi peran aktif, partisipatif, dan pasif untuk menganalisis fungsi birokrasi daerah dalam pembangunan desa berkelanjutan.

Kedua, perbedaan dengan penelitian Ketut Winaya dan Dewa Ayu Putri Wirantari (2024). Penelitian tersebut mengkaji tata kelola inovatif Program Desa Mandiri pada satu desa, yaitu Desa Bongkasa Pertiwi, dengan fokus pada partisipasi masyarakat dan penguatan kapasitas aparatur desa. Karakteristik objek penelitian berada pada level mikro dengan pendekatan studi kasus desa tunggal. Sementara itu, penelitian ini mengkaji institusi pemerintah daerah pada level meso, yaitu DPMD Kabupaten Serdang Bedagai yang membina seluruh desa dalam wilayah administrasinya. Dari aspek kebijakan, penelitian terdahulu berorientasi pada implementasi program Desa Mandiri, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan pembangunan desa berbasis Indeks Desa dan SDGs Desa yang menjadi instrumen nasional terbaru. Dengan demikian, fokus penelitian ini tidak hanya melihat partisipasi masyarakat, tetapi juga peran birokrasi sebagai aktor utama penggerak pembangunan desa.

Ketiga, perbedaan dengan penelitian Fajar dkk. (2022). Penelitian Fajar dkk. menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis relevansi dan pengembangan indikator IDM agar lebih selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Fokus utamanya terletak pada penyempurnaan instrumen pengukuran pembangunan desa. Sebaliknya, penelitian ini tidak membahas konstruksi indikator atau pengembangan instrumen indeks, melainkan mengkaji implementasi dan pemanfaatan hasil pengukuran Indeks Desa oleh pemerintah daerah dalam proses pembinaan desa. Dari segi metode, Fajar dkk. menggunakan analisis kuantitatif terhadap variabel pembangunan berkelanjutan, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami dinamika peran birokrasi dalam praktik penyelenggaraan pembangunan desa.

Keempat, perbedaan dengan penelitian Fakrusyi Sahkirin Hibatur Rokhman dkk. (2025). Penelitian tersebut menitikberatkan pada hubungan antara Dana Desa dan peningkatan Indeks Desa Membangun melalui analisis regresi data panel. Variabel yang dianalisis berfokus pada penyerapan anggaran, kecepatan penyaluran Dana Desa, serta pengaruhnya terhadap capaian indeks pembangunan desa. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak mengukur pengaruh variabel keuangan terhadap status desa, melainkan mengkaji peran organisasi pemerintah daerah dalam proses fasilitasi, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pembangunan desa. Dari sisi metode, penelitian Rokhman dkk. bersifat kuantitatif eksplanatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis peran kelembagaan yang lebih menekankan pada proses dan dinamika implementasi kebijakan.

Kelima, perbedaan dengan penelitian Rohiani (2021). Penelitian Rohiani berfokus pada perencanaan tata ruang desa, pemetaan potensi wilayah, serta pelaksanaan bimbingan teknis bagi

kepala desa untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Objek penelitian terletak pada pengelolaan potensi desa dan peningkatan kapasitas aparatur desa secara teknis. Sementara itu, penelitian ini menelaah peran DPMD sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki mandat formal dalam mengoordinasikan pembangunan desa secara menyeluruh. Dari aspek kebijakan, penelitian Rohiani berorientasi pada tata ruang dan perencanaan desa, sedangkan penelitian ini berorientasi pada peningkatan status desa melalui Indeks Desa dan pencapaian SDGs Desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Berdasarkan uraian tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis yang belum banyak dikaji dalam penelitian terdahulu, yaitu peran institusi birokrasi pemerintah daerah (DPMD) dalam pembangunan desa berkelanjutan melalui peningkatan status desa berdasarkan Indeks Desa, dengan menggunakan Teori Peran Soekanto sebagai pisau analisis, serta ditempatkan dalam konteks kebijakan terbaru berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, SDGs Desa, dan agenda pembangunan nasional Asta Cita. Selain itu, penelitian ini menggeser fokus kajian dari level desa tunggal menuju level kabupaten sehingga mampu menjelaskan hubungan antara kebijakan pembangunan desa secara makro dengan implementasinya pada tingkat desa.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serdang Bedagai dalam pembangunan desa berkelanjutan melalui peningkatan status desa berdasarkan Indeks Desa.

II. METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif sebagai metode utama untuk mengurai, menggambarkan, dan menginterpretasikan fenomena peran kelembagaan yang dikaji. Pemilihan pendekatan kualitatif ini didasarkan pada kebutuhan sosiologis-pemerintahan untuk mengeksplorasi secara mendalam, utuh, dan kontekstual mengenai proses pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta kendala-kendala manajerial yang dialami birokrasi dan aparatur desa, yang tidak dapat ditangkap secara memadai apabila hanya menggunakan angka-angka statistik kuantitatif semata (F. Simangunsong, 2017).

Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan secara rigid melalui tiga teknik utama:

1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): Dilakukan terhadap para informan kunci (*key informants*) yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan otoritas kebijakan dan keterlibatan langsung dalam program pembangunan desa. Informan kunci terdiri dari Kepala Dinas PMD Kabupaten Serdang Bedagai, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, fasilitator lapangan/pendamping desa, Kepala Desa Tarean, Kepala Desa Tapak Meriah, Kepala Desa Sipispis, serta Operator Desa Tarean.
2. Observasi Non-Partisipatif: Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap proses pelaksanaan pembinaan, mekanisme input data Indeks Desa, serta jalannya forum koordinasi asistensi APBDes di kantor DPMD maupun di lokasi desa sampel.
3. Dokumentasi: Pengumpulan dokumen-dokumen resmi berupa data capaian Indeks Desa Kabupaten Serdang Bedagai, Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa, Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 66 Tahun 2025, serta profil desa sampel.

Validitas dan keabsahan data kualitatif dijaga ketat melalui teknik triangulasi sumber (memverifikasi kesesuaian informasi antara Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Desa, dan Operator Desa) serta triangulasi teknik (membandingkan hasil wawancara dengan bukti dokumen laporan dan observasi lapangan). Analisis data bergerak secara sirkular mengikuti model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan reduksi data (menyeleksi dan mengklasifikasikan data wawancara sesuai dimensi teori peran), penyajian data (*data display* dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel matriks), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi akhir. Penelitian lapangan ini dilaksanakan secara intensif selama dua bulan penuh, terhitung mulai bulan Maret hingga April 2026, mengambil lokus utama di Kantor DPMD Kabupaten Serdang Bedagai serta tiga desa sampel (Desa Tarean, Desa Tapak Meriah, dan Desa Sipispis) (Ernawati, 2019).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis mengenai peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serdang Bedagai dalam pembangunan desa berkelanjutan dibedah menggunakan tiga dimensi operasional dalam Teori Peran Soekanto: peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif. Pendekatan sosiologi pemerintahan ini digunakan untuk melihat bagaimana sebuah instansi struktural tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana regulasi normatif, melainkan juga bertindak sebagai dinamisator, fasilitator, sekaligus benteng birokrasi dalam menghadapi dinamika teknis di lapangan. Melalui tiga dimensi ini, efektivitas penggunaan instrumen Indeks Desa sebagai basis intervensi kebijakan dan evaluasi kemajuan pembangunan desa dapat diukur secara mendalam, objektif, dan kontekstual.

3.1. Peran Aktif DPMD dalam Kebijakan Berbasis Indeks Desa

Peran aktif direfleksikan melalui inisiatif regulasi, eksekusi program penguatan kapasitas, dan pengelolaan instrumen fiskal desa yang melekat pada kewenangan langsung DPMD. Dalam dimensi ini, DPMD Kabupaten Serdang Bedagai bertindak sebagai penggerak utama (*driver*) kebijakan yang tidak sekadar menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat, melainkan melakukan inovasi diskresi di tingkat daerah. Salah satu wujud nyata dari peran aktif ini adalah pengawalan implementasi kebijakan penganggaran desa yang berbasis pada penguatan aspek ketahanan lingkungan, peningkatan ketahanan ekonomi, dan mitigasi iklim perdesaan. Hal ini diformalisasikan secara legal melalui penerapan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026. Perbup ini secara aktif mengarahkan alokasi Dana Desa untuk merespon kelemahan-kelemahan indikator ekologi desa, seperti pengelolaan sampah terpadu, penyediaan ruang terbuka hijau desa, dan mitigasi bencana berbasis komunitas perdesaan.

Tabel 1 berikut menyajikan data agregat kemajuan sebaran status desa di Kabupaten Serdang Bedagai dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2023-2025) sebagai dampak langsung dari intervensi peran aktif DPMD:

Tabel 1.
Perkembangan Capaian Status Desa Kabupaten Serdang Bedagai (2023-2025)

Status Desa	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tren Perubahan
Desa Mandiri	10	38	74	Meningkat Pesat (+64)
Desa Maju	53	91	121	Meningkat Signifikan (+68)
Desa Berkembang	180	114	48	Menurun Drastis (-132)
Desa Tertinggal	0	0	0	Konstan Nol (0)

Total Desa	243	243	243	-

Sumber: Data Sekunder DPMD Kabupaten Serdang Bedagai, Diolah Peneliti, 2026

Data pada Tabel 1 menunjukkan keberhasilan signifikan dari peran aktif DPMD, di mana kuantitas Desa Mandiri melonjak tajam dari hanya 10 desa pada tahun 2023 menjadi 74 desa pada akhir tahun 2025. Lonjakan yang masif ini mencerminkan adanya komitmen manajerial yang terstruktur dalam pembinaan kewilayahan. Keberhasilan ini dibarengi dengan efektivitas menekan jumlah Desa Berkembang, yang semula mendominasi lanskap daerah dengan jumlah 180 desa pada tahun 2023, menyusut drastis hingga tersisa hanya 48 desa pada akhir tahun 2025.

Keberhasilan tata kelola yang integratif ini mengantarkan Kabupaten Serdang Bedagai meraih rata-rata akumulatif nilai Indeks Desa sebesar 0,7401. Berdasarkan standar klasifikasi Kementerian Desa, pencapaian angka ini menempatkan Kabupaten Serdang Bedagai berstatus secara makro sebagai Kabupaten Berstatus Desa Maju, sekaligus menduduki peringkat kedua tertinggi dalam pencapaian akumulatif Indeks Desa di seluruh Provinsi Sumatera Utara. Prestasi ini menegaskan bahwa intervensi pembinaan yang dilakukan oleh DPMD mampu menggerakkan indikator-indikator makro ketahanan desa secara berkesinambungan.

Selain pergeseran status tipologi desa, efektivitas peran aktif DPMD ini ditopang secara kokoh oleh tata kelola dan pengawasan aspek fiskal yang ketat di tingkat hulu hingga hilir. DPMD secara aktif mengelola, memverifikasi, dan menyalurkan anggaran Dana Desa secara makro yang menyentuh angka akumulatif sangat masif, yaitu lebih dari Rp218 Miliar. Guna memastikan anggaran yang besar ini tidak diselewengkan dan tepat sasaran, DPMD menerapkan sistem asistensi berlapis dan monitoring berkala secara berkala via digital maupun turun langsung (*on-site monitoring*).

Melalui langkah proaktif tersebut, DPMD berhasil mendorong tingkat rasio penyerapan anggaran secara konsisten di atas angka 95% di seluruh 243 desa yang tersebar di Kabupaten Serdang Bedagai. Penyerapan yang tinggi ini tidak dibiarkan mengalir pada sektor konsumtif, melainkan dialokasikan secara riil pada penguatan fondasi ekonomi masyarakat perdesaan dan pemenuhan infrastruktur dasar berkelanjutan.

Efektivitas intervensi ini dibuktikan secara empiris di lapangan dengan terbentuk dan aktifnya 133 unit Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang legal dan beroperasi di berbagai sektor usaha mikro di seluruh wilayah kabupaten. Keberadaan BUMDes-BUMDes ini menjadi motor baru penggerak Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan penyerap tenaga kerja lokal. Di sisi lain, peran aktif dalam dimensi pembangunan fisik diwujudkan melalui akselerasi pembangunan infrastruktur konektivitas fisik perdesaan. Berdasarkan data evaluasi DPMD, persentase jalan poros desa dengan kondisi baik meningkat signifikan dari semula hanya 44,79% pada awal tahun 2023 menjadi 56% pada akhir tahun 2025. Perbaikan aksesibilitas jalan ini berdampak langsung pada penurunan biaya logistik hasil pertanian masyarakat desa dan mempercepat mobilitas ekonomi antarkecamatan.

Secara teoritis, peran aktif DPMD ini membuktikan bahwa birokrasi pemerintahan daerah mampu menjalankan fungsi *regulator* sekaligus *enabler* yang efektif ketika didukung oleh instrumen pengukuran yang valid seperti Indeks Desa. DPMD berhasil memutus rantai kebiasaan lama perencanaan desa yang bersifat spekulatif (*guesswork*) menjadi perencanaan yang bersifat ilmiah berbasis data aktual (*evidence-based policy*). Aparatur dinas tidak lagi sekadar memeriksa kelengkapan berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) secara pasif, tetapi secara aktif mengintervensi substansi APBDes agar linier dengan perbaikan nilai indikator ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi desa yang masih rendah.

3.2. Peran Partisipatif DPMD dalam Fasilitasi dan Sektoral

Peran partisipatif dalam kerangka Teori Soekanto diwujudkan melalui kemampuan institusi dalam membuka ruang kolaborasi, memfasilitasi ruang-ruang dialog yang inklusif di tingkat bawah, serta membangun jaringan kerja sama lintas sektor (*cross-sectoral collaboration*) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam dimensi ini, DPMD melepaskan ego sektoral birokrasi dan memosisikan dirinya sebagai jembatan interaksi. DPMD tidak bertindak sebagai pelaksana tunggal yang berjalan sendiri, melainkan sebagai fasilitator yang menjamin bahwa proses pembangunan desa melibatkan partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dari seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok-kelompok marginal yang selama ini sering terabaikan di tingkat perdesaan, seperti kelompok perempuan, lansia, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Wujud nyata fasilitasi partisipatif ini diimplementasikan DPMD dalam pengawalan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). DPMD menerbitkan pedoman operasional yang mewajibkan setiap desa mengalokasikan kuota keterwakilan minimal 30% bagi kelompok perempuan dan menyediakan ruang penyampaian aspirasi khusus bagi penyandang disabilitas dalam perumusan skala prioritas desa. Fasilitator lapangan dan pendamping desa yang berada di bawah pembinaan langsung DPMD bertindak sebagai mentor di lapangan untuk memastikan bahwa suara kelompok marginal tidak sekadar ditampung secara administratif, melainkan diadopsi ke dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Dengan demikian, program-program pembangunan yang lahir dari rahim Musrenbangdes benar-benar mencerminkan kebutuhan rill dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar kemanusiaan di tingkat akar rumput.

Sementara itu, pada level horizontal pemerintahan kabupaten, DPMD menyadari sepenuhnya bahwa upaya peningkatan dimensi dan skor Indeks Desa tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi tunggal secara parsial. Isu ketertinggalan desa merupakan masalah sistemik yang membutuhkan pendekatan multisektor yang terintegrasi. Oleh karena itu, DPMD mengambil peran partisipatif-strategis dengan menginisiasi pembentukan Forum Rencana Aksi Bersama Lintas OPD Kabupaten Serdang Bedagai. Forum ini berfungsi sebagai wadah konsolidasi program kerja makro kabupaten agar bergerak selaras menuju lokus desa yang sama. Melalui forum ini, DPMD menyodorkan basis data sektoral Indeks Desa yang telah dipetakan per kecamatan dan per desa sebagai "peta jalan" intervensi bagi dinas teknis terkait.

Pertama, pada Indikator Ketahanan Sosial, yang mencakup pemenuhan standar pelayanan kesehatan dasar dan mutu pendidikan perdesaan, DPMD secara partisipatif menyinkronkan datanya dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Dari hasil pemetaan data Indeks Desa, diidentifikasi desa-desa yang memiliki skor rendah pada akses poskesdes dan ketersediaan tenaga medis. Data komprehensif ini kemudian digunakan oleh Dinas Kesehatan sebagai dasar penempatan bidan desa dan pemenuhan fasilitas alat kesehatan. Di sektor pendidikan, data DPMD mengenai angka putus sekolah dan kerusakan fasilitas PAUD diserahkan kepada Dinas Pendidikan untuk intervensi program beasiswa kedinasan serta rehabilitasi ruang kelas di wilayah desa terpencil, sehingga penargetan anggaran daerah menjadi jauh lebih presisi dan efisien.

Kedua, pada Indikator Aksesibilitas Transportasi dan Infrastruktur fisik, DPMD menjalin kerja sama intensif dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Banyak jalan desa yang statusnya beririsan dengan jalan kabupaten berada dalam kondisi rusak berat, yang berakibat pada rendahnya skor dimensi infrastruktur pada Indeks Desa di wilayah tersebut. Melalui penyerahan data

berbasis spasial dan kuantitatif dari DPMD, Dinas PUPR dapat menyusun skala prioritas pengaspalan dan pengerasan jalan poros kabupaten yang melintasi desa-desa berkembang. Kolaborasi ini memastikan bahwa pembangunan infrastruktur ke-PU-an dari APBD kabupaten bersambung secara fungsional (*interconnected*) dengan pembangunan jalan lingkungan desa yang dibiayai oleh Dana Desa, menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi mobilitas warga.

Ketiga, pada Indikator Ketahanan Ekonomi, DPMD membangun sinergi taktis dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Koperasi dan UKM. Masalah utama yang dihadapi oleh 133 BUMDes aktif di Kabupaten Serdang Bedagai adalah keterbatasan jangkauan pasar dan rendahnya inovasi kemasan produk lokal. Menyadari keterbatasan keahlian teknis internalnya, DPMD menggandeng Disperindag untuk masuk ke desa-desa sampel guna memberikan pelatihan standardisasi mutu produk, pengurusan izin edar PIRT, hingga fasilitasi perluasan jaringan pasar melalui pameran daerah dan digitalisasi pemasaran (*e-commerce*). Melalui peran partisipatif multisektor ini, pembangunan desa berkelanjutan tidak lagi berjalan secara sporadis, melainkan mewujud sebagai gerakan kolektif birokrasi yang padu dan terarah demi meningkatkan kesejahteraan makro masyarakat Serdang Bedagai.

3.3. Peran Pasif DPMD dan Hambatan yang Dihadapi

Peran pasif dalam konteks tata kelola pemerintahan sosiologis tidak diartikan sebagai sikap diam tanpa tindakan, melainkan merujuk pada kepatuhan birokratis pada regulasi formal di atasnya, penyerapan aspirasi normatif, aturan batasan struktural yang membatasi ruang gerak instansi, serta bagaimana instansi merespon dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi eksternal yang berada di luar kendali otoritas formalnya (*beyond programmatic control*). Sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah, DPMD Kabupaten Serdang Bedagai terikat pada asas legalitas, di mana setiap tindakan, pengeluaran anggaran, dan pembinaan wajib memiliki dasar hukum yang jelas dari Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Desa. Dalam dimensi peran pasif ini, DPMD dituntut memiliki ketahanan organisasi (*organizational resilience*) dalam menghadapi benturan antara tuntutan ideal regulasi pusat dengan kompleksitas realitas sosial-ekonomi masyarakat perdesaan di lapangan.

Dalam menjalankan perannya yang kompleks tersebut, DPMD Kabupaten Serdang Bedagai berhadapan langsung dengan serangkaian hambatan struktural, kultural, dan teknikal yang nyata. Hambatan-hambatan ini menuntut instansi untuk senantiasa melakukan penyesuaian strategi secara lincah (*agile governance*) agar program pembangunan tidak mengalami stagnasi:

Hambatan Pertama: Keterbatasan Kapasitas Literasi Data Aparatur Desa.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan para informan di lapangan, terungkap fakta sosiologis bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa masih menjadi salah satu batu sandungan terbesar. Masih banyak ditemukan operator desa dan kepala desa, khususnya yang baru terpilih melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, yang belum memiliki kecakapan digital yang memadai. Mereka mengalami kesulitan teknis dalam mengoperasikan aplikasi berbasis web seperti Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) dan platform penginputan kuesioner Indeks Desa.

Hambatan kultural berupa resistensi terhadap perubahan teknologi membuat sebagian aparatur desa gagap dan keliru dalam melakukan input data indikator objektif desa. Dampak turunannya, mereka mengalami kesulitan mendasar dalam menerjemahkan rekomendasi kuantitatif berbentuk angka skor Indeks Desa ke dalam narasi program kerja strategis dokumen RPJMDes dan APBDes. Banyak aparatur desa yang masih terjebak pada pola pikir tradisional bahwa pembangunan desa hanyalah

seputar membangun parit, semenisasi jalan, dan pembangunan fisik kantor, tanpa kemampuan membaca urgensi pemenuhan indikator sosial dan ekologi yang ditunjukkan oleh data Indeks Desa.

Hambatan Kedua: Kendala Geografis dan Keterbatasan Konektivitas Digital di Wilayah Terpencil.

Meskipun secara umum Kabupaten Serdang Bedagai mengalami kemajuan infrastruktur, realitas geografis menunjukkan masih terdapat klaster desa sampel di wilayah pelosok dan pesisir yang dikategorikan sebagai wilayah *blank spot* internet. Desa-desa seperti Desa Tapak Meriah dan beberapa desa di wilayah Sipispis memiliki topografi berbukit dan akses jalan tanah yang sulit dilalui, terutama saat musim penghujan. Hambatan fisik geografis ini berbanding lurus dengan minimnya ketersediaan pemancar sinyal telekomunikasi.

Keterbatasan konektivitas digital ini membatasi ruang gerak operasional aparat desa untuk melakukan pemutakhiran data secara *real-time*. Di sisi lain, kendala aksesibilitas ini juga membatasi frekuensi kunjungan langsung pembinaan lapangan oleh tim fasilitator DPMD kabupaten karena keterbatasan armada dan waktu tempuh. Akibatnya, proses sinkronisasi, validasi, dan input data Indeks Desa dari wilayah-wilayah terpencil tersebut seringkali mengalami keterlambatan (*delay* atau *lagging* data), yang pada akhirnya menghambat akurasi pengambilan keputusan di tingkat kabupaten.

Hambatan Ketiga: Kesenjangan Kapasitas Ekonomi dan Manajerial Antardesa.

Analisis data empiris menunjukkan adanya jurang pemisah (*gap*) perkembangan yang lebar antara 74 Desa Mandiri yang telah mapan dengan 48 Desa Berkembang yang masih tertinggal di Kabupaten Serdang Bedagai. Desa-desa Mandiri umumnya memiliki struktur kelembagaan yang kuat, kepemimpinan kepala desa yang inovatif, serta Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang tinggi dari hasil optimalisasi BUMDes yang sukses berjejaring dengan pihak swasta.

Sebaliknya, 48 Desa Berkembang yang tersisa mayoritas berada dalam kondisi ketergantungan fiskal yang sangat akut terhadap kucuran Dana Desa dari pemerintah pusat. Kelembagaan BUMDes di desa berkembang banyak yang statusnya "papan nama" alias tidak beroperasi secara aktif akibat salah urus (*mismanagement*), konflik internal kepengurusan, dan ketiadaan produk unggulan desa yang bernilai jual. Kesenjangan kapasitas yang timpang ini menciptakan beban ganda bagi DPMD, karena instansi harus membagi konsentrasi dan sumber daya anggaran pembinaan secara asimetris: di satu sisi harus mempertahankan performa Desa Mandiri agar tidak turun status, dan di sisi lain harus bekerja ekstra keras melakukan asistensi mendasar untuk mengangkat marwah 48 Desa Berkembang agar keluar dari zona ketertinggalan ekonomi.

Ketiga hambatan sosiologis dan manajerial ini menegaskan bahwa peran pasif DPMD dalam mematuhi regulasi formal harus diimbangi dengan strategi mitigasi yang taktis di lapangan. Kepatuhan birokratis tidak boleh membelenggu kreativitas dinas untuk melahirkan solusi lokal atas kendala SDM, sinyal internet, dan kesenjangan kapasitas antardesa tersebut. Penataan strategi mitigasi yang komprehensif menjadi agenda mutlak demi menjaga keberlanjutan tren positif pergeseran status desa menuju kemandirian yang substantif di Kabupaten Serdang Bedagai.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa keberhasilan akuntabilitas pembangunan desa berkelanjutan sangat ditentukan oleh ketepatan institusi birokrasi dalam memfungsikan data indikator makro, khususnya Indeks Desa, sebagai dasar formulasi intervensi kebijakan lokal. Dalam konteks sosiologi pemerintahan, temuan ini memperkuat posisi data makro bukan lagi sekadar instrumen pelaporan administratif yang bersifat formalitas di akhir tahun anggaran,

melainkan bertransformasi sebagai kompas strategis kedinasan. Penggunaan instrumen ini secara tepat mampu mengubah pola perencanaan pembangunan konvensional yang selama ini bercorak spekulatif atau politis, menjadi sebuah kebijakan berbasis pembuktian lapangan yang akurat (*evidence-based policy*). Pola intervensi yang dikomandoi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serdang Bedagai mengonfirmasi bahwa akselerasi kemandirian wilayah perdesaan mensyaratkan adanya sinkronisasi yang ketat antara orientasi anggaran fiskal kabupaten dengan kebutuhan riil pada dimensi ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi di tingkat desa.

Jika dikaitkan dengan pemetaan dalam literatur terdahulu, temuan riset ini menunjukkan adanya titik temu (*konvergensi*) teoretis sekaligus batas pembeda (*divergensi*) yang tajam. Guna menguji keabsahan ilmiah dari hasil penelitian ini, diskusi teoretis dipaparkan secara mendalam melalui komparasi terhadap lima studi terdahulu yang relevan sebagai berikut:

Pertama, jika dikomparasikan dengan studi yang dilakukan oleh Agus Nyoman Astika dan Nyoman Sri Subawa (2021) mengenai evaluasi pembangunan desa berbasis Indeks Desa Membangun (IDM), ditemukan adanya konvergensi yang kuat dalam melihat dampak bias anggaran. Riset Astika dan Sri Subawa menemukan bahwa fokus anggaran pembangunan yang melulu bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik (*semenisasi*) tanpa mengindahkan sektor pemberdayaan masyarakat akan memicu terjadinya bias ketimpangan internal desa. Temuan di Kabupaten Serdang Bedagai membenarkan tesis tersebut; sebelum adanya intervensi rigid dari DPMD, desa-desa cenderung menghabiskan Dana Desa untuk fisik kantor desa meskipun skor kesehatan dan pendidikannya rendah. Namun, divergensi kebijakan yang radikal ditunjukkan dalam penelitian ini. Jika Astika dan Sri Subawa hanya berhenti pada rekomendasi evaluatif, DPMD Kabupaten Serdang Bedagai melangkah lebih jauh secara legal-formal dengan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 66 Tahun 2025. Kebijakan ini secara asimetris "mengunci" dan memaksa prioritas belanja desa agar berjalan linier dengan pemenuhan indikator Indeks Desa yang lemah, sebuah langkah intervensi struktural tingkat kabupaten yang tidak ditemukan dalam studi Astika.

Kedua, diskusi teoretis terhadap hasil penelitian Ketut Winaya dan Dewa Ayu Putri Wirantari (2024) menunjukkan persamaan (*konvergensi*) mengenai urgensi peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) lokal. Winaya dan Wirantari menegaskan bahwa tata kelola inovatif dalam program Desa Mandiri hanya dapat tegak berdiri di atas fondasi aparatur lokal yang kompeten. Sejalan dengan hal tersebut, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa lompatan status Desa Mandiri di Serdang Bedagai disokong secara masif oleh intensitas bimbingan teknis yang digelar oleh DPMD bagi para operator desa dalam menguasai aplikasi Sistem Informasi Desa (SID). Sisi divergensi yang menjadi pembeda utama terletak pada Karakteristik Objek. Riset Winaya dan Wirantari menggunakan pendekatan mikro-spesifik pada tingkat desa tunggal yang relatif homogen dan mandiri (Desa Bongkasa Pertiwi). Sebaliknya, riset ini meneliti ruang lingkup makro sosiologis berskala kabupaten yang heterogen, di mana DPMD harus mengawal 243 desa dengan dinamika polarisasi wilayah yang ekstrem, mencakup desa maju dekat pusat kota hingga desa yang mengalami kendala geografis berat dan *blank spot* digital seperti Desa Tapak Meriah di wilayah Sipispis.

Ketiga, komparasi terhadap studi Agustina Rohiani (2021) memperlihatkan konvergensi pada aspek penataan ruang berbasis potensi ruang desa demi mewujudkan pembangunan yang terarah. Keduanya bersepakat bahwa pemetaan klaster desa merupakan prasyarat mutlak kemandirian berkelanjutan. Kendati demikian, divergensi teoretis dan metodologis muncul ke permukaan. Studi Rohiani mengandalkan pendekatan perencanaan tata ruang konvensional yang bertumpu pada bimbingan teknis kepala desa secara umum. Sementara itu, penelitian ini membuktikan bahwa pembinaan tidak bisa lagi bersifat generalis. Temuan di lapangan menuntut DPMD menerapkan model pembinaan asimetris (*perlakuan khusus*) bagi desa-desa pinggiran yang terisolasi digital. Kegagalan pembinaan yang bersifat pukul rata (*one size fits all*) dalam studi terdahulu dijawab dalam riset ini

melalui pembentukan Forum Rencana Aksi Bersama Lintas OPD di tingkat kabupaten, yang mensinergikan DPMD dengan Dinas Kominfo untuk mengatasi *blank spot* terlebih dahulu sebelum mematangkan literasi data aparatur desa.

Keempat, jika dihadapkan pada riset kuantitatif oleh Fajar et al. (2022), terdapat konvergensi konseptual yang erat. Fajar et al. menyarankan pemutakhiran indikator pembangunan desa agar selaras dengan target global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs Desa). Temuan empiris di Kabupaten Serdang Bedagai memperkuat proposisi tersebut dengan membuktikan bahwa integrasi indikator SDGs Desa ke dalam aplikasi Indeks Desa lokal berhasil menghasilkan klasifikasi kewilayahan yang jauh lebih objektif, konsisten, dan bebas dari bias subjektivitas politik lokal. Adapun divergensi metodologisnya adalah jika Fajar et al. menguji variabel-variabel tersebut melalui permodelan statistik kuantitatif kering yang berjarak dari realitas sosiologis, riset ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang mendalam. Melalui wawancara mendalam dengan informan kunci DPMD dan triangulasi dokumen, riset ini mampu menyingkap fenomena psikologi birokrasi dan hambatan kultural aparatur desa dalam melakukan input data secara *real-time*, yang tidak mampu ditangkap oleh angka-angka statistik kuantitatif dalam studi Fajar et al.

Kelima, analisis komparatif terhadap studi ekonomi makro oleh Fakrusyi Sahkirin Hibatur Rokhman et al. (2025) mengonfirmasi beberapa aspek sekaligus memunculkan perbedaan manajerial yang subtansial. Melalui analisis regresi data panel, Fakrusyi et al. membuktikan secara matematis bahwa aspek kecepatan penyerapan dan penyaluran anggaran Dana Desa memegang pengaruh signifikan terhadap peningkatan status desa dengan jeda waktu (*time lag*) tertentu. Temuan riset ini mengonformasi (konvergen) asumsi tersebut, di mana realisasi penyerapan Dana Desa di Kabupaten Serdang Bedagai yang konsisten berada di atas angka 95% secara nyata menjadi pemicu utama lompatan kuantitas Desa Mandiri dari yang semula hanya 10 desa melonjak drastis menjadi 74 desa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Namun, letak divergensi manajerialnya adalah riset ini menemukan bahwa besaran fiskal dan kecepatan serapan anggaran akan menjadi sia-sia tanpa adanya sistem pengawasan berlapis (*layering oversight*) dari lembaga pembina formal. Kecepatan salur yang disoroti Fakrusyi et al. dalam riset ini dibuktikan harus dibarengi dengan verifikasi dan validasi (verval) data secara berjenjang oleh DPMD bersama camat untuk mencegah manipulasi data status desa demi mendapatkan insentif fiskal semata.

Sebagai rangkuman teoretis, letak kebaruan radikal (*scientific novelty*) sekaligus karakteristik pembeda utama yang memisahkan riset ini dari seluruh literatur terdahulu berada pada pergeseran paradigma pendekatan tata kelola (*governance paradigm shift*). Ketika mayoritas penelitian terdahulu masih sangat membatasi fokus pengamatan pada evaluasi di tingkat desa tunggal tunggal secara parsial, atau menempatkan gerakan komunitas masyarakat lokal sebagai penggerak tunggal kesuksesan pembangunan yang murni bersifat *bottom-up*, studi kasus di Kabupaten Serdang Bedagai menawarkan perspektif baru yang bersifat integratif. Riset ini memberikan eviden ilmiah yang kokoh bahwa intervensi kebijakan melalui regulasi *top-down* dari birokrasi formal kabupaten yang responsif, asimetris, dan berbasis pada akurasi data makro, mampu mempercepat secara radikal status kemandirian perdesaan. Gabungan harmonis antara komitmen regulasi pemerintah kabupaten (DPMD) dengan partisipasi aktif elemen masyarakat di tingkat bawah melahirkan sebuah model baru tata kelola pembangunan desa berkelanjutan yang integratif, solutif, dan berdampak makro bagi pencapaian target SDGs Desa nasional.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan beberapa dinamika sosiologis di lapangan yang menjadi faktor pendukung dan penghambat utama dalam akselerasi status kemandirian desa di Kabupaten Serdang Bedagai.

Faktor pendukung yang sangat krusial adalah tingginya komitmen serta loyalitas para operator desa dan kader pemberdayaan masyarakat dalam mengawal pemutakhiran data secara sukarela meskipun dihadapkan pada keterbatasan insentif operasional. Selain itu, adanya hubungan emosional yang harmonis dan komunikasi yang cair antara jajaran pimpinan DPMD dengan para kepala desa menciptakan rasa percaya (*trust*) yang tinggi terhadap arah kebijakan pemda.

Namun di sisi lain, peneliti juga mengidentifikasi faktor penghambat yang bersifat struktural dan kultural. Hambatan tersebut meliputi tingginya tingkat rotasi atau pergantian perangkat desa pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak. Fenomena ini berakibat pada hilangnya personil terampil yang telah mendapatkan pelatihan literasi data, sehingga DPMD harus memulai kembali proses bimbingan teknis dari awal. Lebih lanjut, keterbatasan alokasi anggaran khusus untuk penguatan jaringan internet di kantor desa terpencil turut memperparah keterisolasian digital yang memperlambat pelaporan berkala.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serdang Bedagai dalam mendukung pembangunan desa berkelanjutan berbasis Indeks Desa telah berjalan secara optimal. Keberhasilan ini ditopang oleh adanya kolaborasi multisektor yang kuat antara pemerintah daerah melalui Perbup Nomor 66 Tahun 2025 dengan jajaran aparatur desa yang responsif. Melalui integrasi pembinaan ini, kuantitas Desa Mandiri melonjak tajam hingga menyentuh angka 74 desa pada tahun 2025 dan menempatkan Serdang Bedagai pada peringkat kedua capaian Indeks Desa tertinggi se-Provinsi Sumatera Utara.

Guna mempertahankan serta meningkatkan capaian tersebut, disarankan kepada DPMD untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui pembentukan dasbor analitik terintegrasi (*integrated dashboard*) yang menyatukan data SID, Siskeudes, dan kuesioner Indeks Desa. Pemerintah daerah juga seyogianya memperluas kerja sama kemitraan lintas sektor dengan pihak swasta dan wirausahawan lokal melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk memenuhi kelengkapan infrastruktur digital serta pendampingan manajerial bagi BUMDes yang masih berstatus berkembang.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada aspek ruang lingkup geografis dan durasi waktu pengamatan lapangan. Studi kasus kualitatif ini hanya mengambil lokus pada tiga desa sampel di Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan pendekatan model *purposive* Creswell, sehingga dinamika yang ditemukan belum tentu dapat digeneralisasikan sepenuhnya untuk seluruh klaster desa di wilayah Indonesia lainnya.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari bahwa temuan institusional ini masih berada pada tahap awal transformasi regulasi UU No. 3 Tahun 2024. Oleh karena itu, peneliti menyarankan adanya penelitian lanjutan berskala makro yang mengkaji efektivitas model integrasi SDGs Desa dan Indeks Desa pada cakupan wilayah yang lebih luas di tingkat Provinsi Sumatera Utara guna menghasilkan formulasi model sosiologi pemerintahan desa yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama ditujukan kepada Kepala Dinas beserta seluruh jajaran struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serdang Bedagai, Kepala Desa Tarean, Kepala Desa Tapak Meriah, dan Kepala Desa Sipispis yang telah

memberikan izin, kesempatan, dan bantuan data yang luar biasa selama penulis melaksanakan penelitian lapangan. Peneliti juga menyampaikan apresiasi terdalam kepada dosen pembimbing Ibu Dwi Indah Kartika, S.Pd., M.Si., tim fasilitator, pendamping desa, serta seluruh pihak yang telah meluangkan waktu dan memberikan kontribusi pemikiran berharga demi menyukseskan penyusunan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Afnan, D., Wijaya, M., Kartono, D. T., & Wibowo, A. (2025). Community empowerment model in the refuse-derived fuel waste management program in Indonesia. *Cleaner Waste Systems, 12*, 100364. https://doi.org/10.1016/j.clwas.2025.100364

Astika, A. N., & Subawa, N. S. (2021). Evaluasi pembangunan desa berdasarkan Indeks Desa Membangun. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 5*(2), 223–232. https://doi.org/10.31604/jim.v5i2.2021.223-232

Ernawati, D. P. (2019). Analisis sinergi Desa Pakraman dan Desa Dinas dalam peningkatan partisipasi masyarakat pada pembangunan desa di Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 3*(1). http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/620/

Ernawati, D. P. (2021). The effect of economic growth and poverty on development disparities in West Java Province. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4*(2), 2045–2055. https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.2052

Fajar, K. I. D., Rijanta, R., & Kurniawan, A. (2022). Eksplorasi variabel pembangunan berkelanjutan untuk Indeks Desa Membangun Pulau Jawa. *Majalah Geografi Indonesia, 37*(1). https://doi.org/10.22146/mgi.73056

Gatiningsih. (2022). *Strategi peningkatan kualitas pelayanan akte kematian berbasis digital di Kota Medan* (Issue 1). IPDN.

Gokce, N., & Yildiz, A. (2025). Communities of practice and rural women's empowerment: Insights from a case study of grassroots cooperative in Turkey. *Journal of Rural Studies, 119*, 103813. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2025.103813

Kansil, D., & Pusung, P. H. (2021). Pola pembinaan integritas Aparatur Sipil Negara pada pemerintahan daerah Kabupaten Sitaro Sulawesi Utara. *Jurnal Syntax Transformation, 2*(12). https://doi.org/10.46799/jst.v2i12.470

Khadka, A., & Schuett, M. (2024). Exploring women's empowerment and adaptive capacity in Chepang communities of Chitwan, Nepal. *Environmental Development, 52*, 101070. https://doi.org/10.1016/j.envdev.2024.101070

Winaya, I. K., & Wirantari, I. D. A. P. (2024). Innovative governance dalam pengembangan program Desa Mandiri sebagai upaya pembangunan berkelanjutan di Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. *IJESPG Journal, 2*(1), 85–92. https://ijespgjournal.org/index.php/ijespg/article/view/91/77

Lin, J., & Ye, Z. (2025). Wilds to wonders: Digital empowerment and the vitality of rural tourism in Z Village. *Journal of Rural Studies, 120*, 103817. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2025.103817

Macora, N. A. D., Polyando, P., & Hutasoit, I. (2024). Implementasi kebijakan program pemberdayaan usaha kerajinan noken Mama Papua di Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics, 10*(1). https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10(1).15803

Palash, M. S., Haque, A. B. M. M., Rahman, M. W., Nahiduzzaman, M., & Hossain, A. (2024). Economic well-being induced women's empowerment: Evidence from coastal fishing communities of Bangladesh. *Heliyon, 10*(7), e28743. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e28743

Rohiani, A. (2021). Perencanaan penataan ruang desa berbasis potensi desa sebagai kendali pembangunan desa yang terarah dan berkelanjutan. *Journal of Regional and Rural Development Planning, 5*(1), 15–27. https://doi.org/10.29244/jp2wd.2021.5.1.15-27

Rokhman, F. S. H., Kamariyah, S., & Pramudiana, I. D. (2025). Pengelolaan dana desa terhadap pembangunan desa. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan, 3*(6), 274–297. https://doi.org/10.62383/risoma.v3i6.1289

Simangunsong, A. (2023). Penerapan metode Monte Carlo dalam simulasi pengelolaan persediaan alat tulis kantor. *Jurnal SAINTIKOM (Jurnal Sains Manajemen Informatika dan Komputer), 22*(2). https://doi.org/10.53513/jis.v22i2.8718

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan: Teoritik, legalistik, empirik dan inovatif* (Cet. 3). IPDN Press/Alfabeta.